

**PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM KELEMBAGAAN DESA
(STUDI KASUS PADA BKM DESA UMBULMARTANI
DAN JOGOTIRTO)**

Endang Widayati
STIE PARIWISATA API
Endang_widygy@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of the study was to analyze women's participation in rural institutions BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat/ Community Self-Reliance Agency) review of the activity aspects, and control access to establish program. The method used descriptive qualitative approach and triangulation of data. This study uses a case study of 75 BKM in Sleman District selected BKM Bina Sejahtera and Umbul Sejahtera. Sampling with purposive sampling, the primary data collected through observation and interviews with coordinators and members of BKM, Environmental Settlement Executive Unit (UPL), social welfare affairs implementation units (UPS), the financial management units (UPK) and beneficiaries. Secondary data is collected from the program cycle profiles, profile KSM, as well as other data that is relevant. Data analysis based on gender sensitiveness. include: activity profile, the profile of access and control, analysis of the supporting factors and the factors inhibiting women's participation in the in rural institutions. The average of the activity profile of women's participation BKM Bina Sejahtera 42%, Umbul Sejahtera prosperous 62%, it is greater than the target of 30%. Awareness of the role as the representative of community member, is quite high. Reflected in the presence and involvement in the planning, implementation and in monitoring activities. Access and control of women in the planning, implementation, monitoring and evaluation proceeds benefit the development is quite large. The results reflected from the target Key Performance Indicator, a minimum of 40% female participation, achievement of 42% and 50%. Besides all respondents stated that there are no obstacles for women to participate in village institutions.

Keywords: Participation, women, Institutional, BKM

I. PENDAHULUAN

Lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah perempuan. Hal ini merupakan potensi SDM yang cukup besar apabila kaum perempuan memiliki kapasitas yang memadai dan ada peluang untuk berperan didalamnya. Namun fenomena yang terjadi adalah sebaliknya. Kaum perempuan masih dianggap sebagai kaum yang marginal, lemah dan memiliki kemampuan yang terbatas. Fenomena ini diperkuat adanya paradigma perempuan sebagai 'konco wingking'. Paradigma yang diawali dari perbedaan jenis kelamin kemudian mengakibatkan perbedaan peran gender yakni wanita sebagai ibu rumah tangga (peran domestik) dan pria sebagai pencari nafkah (peran publik). Menurut Partini (1999), perbedaan gender ini menimbulkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yang banyak terjadi adalah ketidaksetaraan lelaki-perempuan (*inequality*), perendahan (*sub-ordination*) status perempuan, ketidaktampakan peran (*invisibility*), bias lelaki (*male bias*), diskriminasi, eksploitasi, pelecehan seksual dan profesional, perdagangan perempuan (*trafficking women*), kurangnya posisi tawar-menawar, kurangnya akses dalam pengambilan keputusan politik, perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan yang belum peka gender, keterbatasan kesempatan aktualisasi diri, tindak kekerasan (*violence against women*) dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia perempuan lainnya. Masih banyak kebijakan yang belum berpihak pada kepentingan perempuan. Demikian pula kondisi yang diciptakan seringkali membatasi ruang gerak perempuan untuk berkiprah sesuai dengan kemampuannya. Pemahaman bahwa perempuan lemah, sering mengedepankan emosi daripada logikanya perlu dikaji ulang.

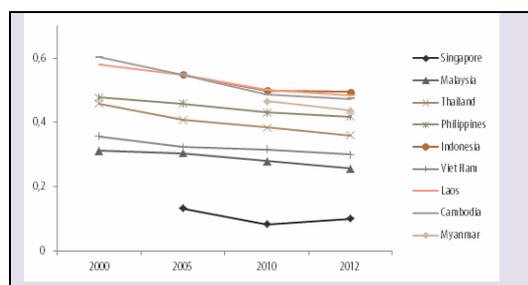
Sejak tahun 2010 UNDP mengukur ketimpangan/ketidaksetaraan gender atau *Gender Inequality Index (GII)* atau indeks ketimpangan gender. Indeks ketimpangan gender menunjukkan adanya kehilangan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya kesenjangan gender karena adanya diskriminasi dari berbagai aspek yakni kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Indeks ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan adanya ketidaksetaraan gender selama ini di masyarakat, serta mengetahui kemajuan pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender. Dengan adanya data IKG dapat digunakan untuk membantu dalam

pembuatan keputusan dan kebijakan pembangunan sehingga dihasilkan pembangunan manusia yang lebih baik.

Dari data *Human Development Report (HDR)* tahun 2013, selama tahun 1990 hingga 2012 terjadi penurunan IKG (periksa gambar I.1). Hal ini memberi gambaran bahwa masing-masing negara ASEAN berusaha untuk mencapai kesetaraan gender dan mengurangi adanya kehilangan dalam pembangunan manusia di negaranya. Singapura berhasil mencapai indeks ketimpangan gender paling rendah sebesar 0,1 pada tahun 2012. Sedangkan Indonesia masih memiliki angka indeks ketimpangan gender yang tinggi, meskipun sudah melakukan berbagai program kesetaraan gender.

Gambar I.1.

Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender di Negara-negara ASEAN Tahun 2000-2012



Sumber: Human Development Report

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Program ini cukup strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang yang disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Tugas pokok BKM diantaranya merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan; mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi. BKM merupakan lembaga kepemimpinan kolektif, yang dikoordinir oleh seorang koordinator BKM. Dalam satu BKM jumlah anggotanya rata-rata sebanyak 13 orang.

Sebagai lembaga kepemimpinan kolektif semua anggota mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kolektifitas kepemimpinan ini bertujuan untuk dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan bijaksana karena tidak didasarkan kepada kekuatan dan kepentingan seseorang.

Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa (BKM) diharapkan akan memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Lebih jauh terdapatnya akses dan kontrol perempuan dalam kelembagaan khususnya dalam penyusunan program dapat mempengaruhi kehidupan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perempuan yang dilibatkan dalam perencanaan dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan dasar perempuan yang seringkali terlewatkan (terlupakan) ketika menyusun rencana kegiatan adalah kaum laki-laki.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa BKM ditinjau dari :

1. Profil aktivitas perempuan dalam BKM
2. Akses dan kontrol perempuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
3. Faktor-faktor yang mendukung partisipasi perempuan dalam BKM
4. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam BKM

II. KAJIAN LITERATUR

2.1. Analisis Gender

Dalam menganalisis partisipasi perempuan tidak dapat terlepas dari analisis gender. Menurut Fakhri (1996), analisis gender memberi perangkat teoritis guna memahami ketidakadilan gender. Untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan perlu pemahaman antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat. Konsep gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin membedakan dua ciri antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Laki-laki memiliki penis, jakala (kalamenjing), dan memproduksi sperma untuk pembuahan; sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi berupa rahim, memproduksi sel telur dan menyusui. Konsep gender merupakan pensifatan yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi sosial maupun kultural. Dari pensifatan tersebut perempuan dianggap cantik,

keibuan, emosional, lemah-lembut dan ciri-ciri lainnya yang dianggap melekat pada perempuan. Laki-laki dianggap memiliki ciri kuat, perkasa, rasional dan ciri-ciri lainnya yang dianggap melekat pada laki-laki. Padahal senyatanya sifat atau ciri-ciri tersebut dapat dipertukarkan diantara keduanya. Laki-laki bisa saja memiliki sifat emosional dan lemah lembut, demikian pula perempuan juga bisa memiliki ciri kuat, perkasa, rasional dan ciri-ciri lainnya. Mengacu pada Partini (1999), analisis gender juga menjadi alat analisis yang dipergunakan dalam pembangunan, yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program khususnya untuk mengetahui apakah peran serta wanita dan pria sudah selaras, serasi dan seimbang dengan kebutuhan mereka, bagaimana kebijaksanaan pada program pembangunan mempunyai dampak yang berbeda pada pria dan wanita. Hal ini dimaksudkan agar wanita mampu berperan serta bersama pria sebagai mitra sejajar yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang saling peduli, saling menghargai, menghormati, mengisi dan membantu dalam melaksanakan pembangunan termasuk kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Dalam pedoman Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang dimaksud gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dalam buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013 (KPPPA, 2013) menyatakan gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan

mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Adanya paham patriarkhi yang menempatkan laki-laki pada derajat yang tinggi berimplikasi pada pemberian kesempatan yang lebih besar dalam peran pengambil keputusan terhadap laki-laki daripada perempuan. Menurut Partini (2012), sebagian terbesar warga masyarakat dibesarkan sebagai generasi yang menganut paham patriarkhi baik di ranah keluarga, di masyarakat, dimana keyakinan terhadap nilai-nilai yang menempatkan laki-laki pada derajat dan kesempatan yang lebih tinggi masih cukup menancap. Ideologi yang tertanam kuat dalam masyarakat ini menjadi dasar berfikir dan bertindak setiap orang yang akhirnya membentuk sebuah konstruksi sosial dengan relasi yang timpang dan berdampak dalam mengambil keputusan baik di ranah keluarga, di masyarakat dan di tataran negara.

Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Sedangkan peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan di dalam rumah berkaitan dengan kerumahtanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan. Kedua peran ini dapat menjelaskan perbedaan peran gender dalam masyarakat. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarga. (KPPPA, 2013). Pembagian peran yang diakibatkan perbedaan gender ini membatasi aktivitas perempuan di ranah publik. Meski begitu dalam mengurus rumah tanggapun ketika perempuan memainkan peran domestik sering kali masih dibatasi dalam hal pengambilan keputusan khususnya yang berhubungan dengan masalah keuangan dan pendidikan anak. Peran dalam menambah penghasilan juga terasa pembatasannya, meskipun banyak perempuan yang memperoleh penghasilan dari usaha yang dilakukan di rumah (dalam industri rumah tangga misalnya) tetap dianggap tidak mempunyai peran yang berarti bahkan ketika memberi nama usahanya masih menggunakan nama suaminya.

2.2. Partisipasi

Menurut Keith Davis (1990) dalam bukunya *“Human Relational Work”* mengatakan bahwa *“participation is defined as mental and emotional involment of a person in a group situation which ecourages him to contribute to group goals and share resposibility in them”* (partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan). Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan seperti yang disampaikan Sofiani (2009) dapat dilihat dari peran perempuan sebagai pelaku, pengendali, pengambil keputusan, penasehat dan penerima manfaat pembangunan. Partisipasi mengandung makna adanya keterlibatan khususnya masyarakat dalam tahap-tahap kegiatan pembangunan baik secara mental dan emosi seseorang didalam kelompok yang mendorong orang tersebut untuk berperan dan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian tujuan kelompok.

2.3. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Dari penelitian yang dilakukan Listyaningsih (2009) tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Di Banten menyebutkan bahwa keterbatasan kesempatan kaum perempuan untuk terlibat dalam forum-forum publik di lingkungannya, di samping secara teknis juga diakui kungkungan peran domestik yang dialami oleh mereka di dalam rumah tangga turut berperan besar dalam membatasi peran eksternal mereka, sehingga peran-peran tersebut otomatis diserahkan sepenuhnya pada laki-laki sebagai kepala rumah tangga, disamping kendala teknis tersebut, komitmen kesungguhan para pelaku kebijakan untuk melibatkan perempuan memang tidak dimiliki oleh para pimpinan di tingkat RT.

Perempuan, terutama dari kalangan miskin seringkali menjadi penerima informasi kedua karena tidak pernah terlibat dalam rembug – rembug yang diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Memang di beberapa tempat kehadiran perempuan dalam penentuan keputusan terjadi walaupun jumlahnya relatif kecil, akan tetapi seringkali suaranya kalah dengan suara laki – laki yang jumlahnya cukup besar, bahkan kadang-kadang mereka hanya ikut hadir tetapi tidak bisa memberikan suaranya. Padahal rembug-rembug yang dilakukan warga merupakan aset yang besar sebagai modal sosial untuk

melibatkan masyarakat dalam proses memecahkan persoalan kehidupan mereka. Kondisi ini seringkali berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang pada gilirannya dapat berakibat adanya kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada kebutuhan perempuan.

Untuk itu menjadi strategis ketika melibatkan perempuan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi (PNPM, 2008). Hal ini disebabkan:

1. Sebagai penghargaan terhadap perempuan sebagai manusia yang merdeka yang berhak untuk menentukan pemecahan masalah yang dihadapinya.
2. Pemecahan masalah - masalah, termasuk masalah kemiskinan yang menyangkut perempuan akan lebih tepat apabila dibicarakan bersama dengan perempuan.
3. Memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai manusia.
4. Potensi yang besar yang dimiliki oleh perempuan, akan sangat berarti apabila digunakan bukan hanya untuk sektor domestik akan tetapi juga dalam sektor publik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
5. Keterlibatan dalam semua proses pembangunan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama.

Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan ialah dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan (Sofyan, 2003). Langkah ini akan terealisasi ketika perempuan mendapat ‘ruang’ dalam aspek-aspek kegiatan baik dalam peran domestik maupun publik. Adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berperan akan menghasilkan manfaat yang besar karena mereka bisa saling mendukung sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki baik perempuan maupun laki-laki.

Sementara itu dari ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang dirumuskan menunjukkan konsistensi pemerintah masih tetap ada untuk berusaha menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk terhadap perempuan dan tetap mewujudkan prinsip-prinsip persamaan hak bagi perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya.

2.4. Kelembagaan.

Kelembagaan sering dihubungkan dengan organisasi, wadah atau pranata. Sesungguhnya

kelembagaan lebih luas dibanding dengan organisasi. Dalam kelembagaan ada kode etik, aturan main, sikap dan tingkah laku yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Menurut Syahyuti, norma dan perilaku merupakan dua obyek pokok dalam kajian kelembagaan, sementara organisasi lebih memperhatikan masalah struktur dan peran. Pengertian kelembagaan tidak terlepas dari pengertian lembaga. Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984). Menurut North DC.(1990), lembaga adalah aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. North membedakan antara institusi dan organisasi dan mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya.

Komponen Kelembagaan (Syahyuti, 2006):

1. Person (orang)
Orang-orang yang terlibat dalam kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas
2. Kepentingan
Orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan/tujuan, sehingga mereka terpaksa harus saling berkomunikasi
3. Aturan
Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut
4. Struktur
Setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri. Dari beberapa pendapat tentang kelembagaan tersebut, cukup jelas perbedaan antara organisasi dan lembaga. Kelembagaan lebih dinamis dibanding organisasi. Adanya aturan main, kode etik, bagi setiap anggota dalam menggerakkan sikap, perilaku, norma dan kepentingan akan membawa kelembagaan mencapai tujuannya. Aturan main yang disepakati bersama baik secara formal maupun informal menjadi pegangan lembaganya. Aturan main akan mempengaruhi perilaku setiap unsur yang ada.

2.5. Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa.

Upaya memberdayakan perempuan perlu terus dilakukan agar mereka tidak terjebak sebagai objek melainkan dapat berperan sebagai subyek dan memberikan seluruh potensinya dalam proses pembangunan. Untuk itu keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa mutlak diperlukan agar dalam proses pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan kepentingan kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam sektor publik ini akan memberikan peluang terhadap pemecahan masalah-masalah perempuan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan mereka. Permasalahan perempuan ditingkat basis ini pada umumnya merupakan masalah-masalah yang mendasar dalam kehidupan, misalnya masalah air, sanitasi, kesehatan ibu dan anak dan bahan bakar. Pemecahan masalah-masalah perempuan akan lebih tepat apabila melibatkan perempuan.

Dengan melibatkan perempuan dalam kelembagaan desa juga mempunyai arti memberi kesempatan kepada kaum perempuan dalam tanggungjawab sosialnya selain itu potensi yang dimiliki perempuan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu menjadi strategis dengan melibatkan perempuan dalam proses pembangunan melalui kelembagaan desa dari penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Bogdan dan Taylor (1975), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Deskripsi merupakan metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu (Sutopo, 2002). Dalam pendekatan ini dengan menggunakan model naturalistik. Pendekatan kualitatif naturalistik menunjukkan pelaksanaan penelitian secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami sehingga dituntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan. (Arikunto, 2006). Seperti pendapat Sugiyono (2004) dalam penelitian kualitatif (naturalistik) peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini menggunakan studi kasus yang mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan pendalaman mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya guna menjawab pertanyaan bagaimana akses dan kontrol perempuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan

di tingkat desa sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Apakah dengan adanya keterlibatan (partisipasi) perempuan dalam kelembagaan mempunyai pengaruh pada pengambilan keputusan yang berpihak pada kebutuhan perempuan.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BKM yang berada di Kabupaten Sleman sebanyak 75 BKM yang terdiri dari 3 BKM dengan kinerja menuju madani, 31 BKM dengan kinerja mandiri dan 31 BKM dengan kinerja berdaya. Dari 75 BKM tersebut hanya ada 4 BKM yang koordinatonya perempuan.

Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus sehingga metode yang tepat untuk penentuan sampel adalah purposive sampling yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah: BKM dengan kinerja mandiri dengan koordinator laki-laki dan perempuan. Kedua BKM tersebut adalah BKM Desa Umbulmartani dengan koordinator laki-laki dan BKM Desa Jogotirto dengan koordinator perempuan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian berperspektif gender dengan pendekatan kualitatif deskriptif, interaksi antara peneliti dengan yang diteliti sangat membantu dalam menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi perempuan. Pertanyaan penelitian tentang 'mengapa' dan 'bagaimana' adalah pertanyaan yang mampu menguak hal yang melatarbelakangi suatu permasalahan. (Partini, 1999). Penambahan data masih dimungkinkan baik semasa analisis maupun saat penulisan laporan.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer dikumpulkan melalui teknik-teknik :

Observasi

Merupakan teknik pengamatan sistematis tentang perilaku responden, dilakukan untuk mendapatkan data empirik berupa aktivitas atau kegiatan terkait dengan tema partisipasi perempuan dalam kelembagaan.

Wawancara Mendalam :

Wawancara mendalam dilakukan agar terjadi interaksi mendalam antara peneliti dan diteliti, dalam suasana yang tidak kaku. Untuk mempermudah proses digunakan panduan wawancara yang berisi garis-garis besar yang

berkaitan dengan hal-hal yang akan digali dari informan. Meskipun begitu pertanyaan dapat berkembang dan meluas sesuai dengan kepentingan dan situasinya. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait yakni koordinator dan anggota BKM, Unit pelaksana lingkungan (UPL), unit pelaksana sosial (UPS) dan unit pelaksana keuangan (UPK).

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui sumber-sumber data berupa profil siklus program, profil BLM, profil KSM, maupun data lainnya yang relevan.

Validitas

Data yang diperoleh selama proses penelitian akan diuji kembali dengan melakukan pengujian validitas data melalui penggunaan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi ada empat macam, yaitu pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidik, teori.

Untuk mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi dengan triangulasi dilakukan dengan cara : (Moelong, Lexy, 2002).

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti, dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dalam berbagai pendapat dan pandangan orang lain, seperti masyarakat, anggota BKM, koordinator BKM serta unit-unit pengelola (UPL, UPS dan UPK).
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Tahun 2008 P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Program ini cukup strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa "lembaga kepemimpinan masyarakat" yang representatif, mengakar dan

kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang yang disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Tugas pokok BKM diantaranya merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan; mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi. BKM merupakan lembaga kepemimpinan kolektif, dengan jumlah anggota 13 orang dikoordinir oleh seorang koordinator. Sebagai lembaga kepemimpinan kolektif semua anggota mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kolektifitas kepemimpinan ini bertujuan untuk dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan bijaksana karena tidak didasarkan kepada kekuatan dan kepentingan seseorang.

Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa (BKM) diharapkan akan memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Lebih jauh terdapatnya akses dan kontrol perempuan dalam kelembagaan khususnya dalam penyusunan program dapat mempengaruhi kehidupan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perempuan yang dilibatkan dalam perencanaan dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan dasar perempuan yang seringkali terlewatkan (terlupakan) ketika penyusun rencana kegiatan adalah kaum laki-laki. Kegiatan yang dilaksanakan BKM dirinci dalam sebuah siklus tahunan yang terdiri dari:

Tabel 5.1. Siklus Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri Perkotaan

Siklus		
Tahun 1	Tahun 2/3	Tahun 4
<input type="checkbox"/> Rembug Kesiapan Masyarakat	<input type="checkbox"/> PJM Pronang kis	<input type="checkbox"/> Rembug Refleksi 3 Tahunan
<input type="checkbox"/> Refleksi Kemiskinan	<input type="checkbox"/> Review Partisipatif	<input type="checkbox"/> Refleksi Kemiskinan
<input type="checkbox"/> Pemetaan Swadaya	<input type="checkbox"/> RWT	<input type="checkbox"/> Pemetaan Swadaya
<input type="checkbox"/> Pembangunan BKM		<input type="checkbox"/> Pembangunan BKM
<input type="checkbox"/> Pembangunan KSM		<input type="checkbox"/> Pembangunan KSM
<input type="checkbox"/> Penyusunan PJM Pronangkis		<input type="checkbox"/> Penyusunan PJM Pronangkis
<input type="checkbox"/> Sinergi dengan perencanaan pembangunan		<input type="checkbox"/> Sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah
		<input type="checkbox"/> Pelaksanaan

daerah		kegiatan
<input type="checkbox"/> Pelaksanaan kegiatan		<input type="checkbox"/> Evaluasi / Review partisipatif
<input type="checkbox"/> Evaluasi / Review partisipatif		

Sumber: Modul Tinjauan Pemahaman Terhadap Program

Proses yang terjadi dalam siklus ini merupakan proses pembelajaran masyarakat dalam mengorganisir kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun pertama diawali dengan Rembug Kesiapan Masyarakat. Sebenarnya rembug kesiapan warga ini tidak masuk dalam siklus karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh warga untuk menentukan kesepakatan akan menerima atau menolak diselenggarakannya program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah tersebut. Apabila dari hasil kesepakatan warga menerima dilaksanakannya program maka selanjutnya masyarakat melakukan kegiatan refleksi kemiskinan dan siklus-siklus lainnya.

BKM Bina Sejahtera dan BKM Umbul Sejahtera memiliki siklus yang berbeda. BKM Bina Sejahtera saat penelitian dilakukan dalam siklus tahap empat, sedangkan BKM Umbul Sejahtera dalam tahap siklus dua. Oleh karenanya kegiatan yang dilakukan oleh kedua BKM ini berbeda.

BKM Bina Sejahtera Jogotirto, dibentuk tanggal 30 September 2014. Koordinator BKM Ibu Suatmini, Alamat di kompleks Balai Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. Disahkan oleh Notaris Ny. Harmumtiwati tanggal 2 Desember 2014. Dari 13 anggota BKM, empat diantaranya adalah perempuan. Lembaga ini dilengkapi dengan UPL (Unit Pengelola lingkungan) 1 orang, UPS (Unit Pengelola Sosial) 1 orang, dan UPK (Unit Pengelola Keuangan) 3 orang.

Cakupan wilayah meliputi 10 dusun dengan jumlah penduduk 8.738 jiwa, hampir separonya adalah warga miskin (4.135 jiwa). Untuk lebih jelasnya periksa tabel 5.2.

Tabel 5.2.

Cakupan Wilayah dan Cakupan Penduduk BKM Bina Sejahtera

Cakupan Wilayah	Cakupan Penduduk	Kategori Miskin
Jml 10 Dusun	Jml KK 3.206	Jml 1.36 KK Miskin
Jml RW 32	Jml Jiwa 8.738	Jml 4.13

		Jiwa	5
		Misk	
		in	
Jml RT	76	Jml	6.542
		Dewasa	

Sumber: Korkot Sleman BKM Umbul Sejahtera Umbulmartani berdiri pada tanggal 13 Desember 2013 dengan diberi nama BKM Umbul Sejahtera. Pengesahan oleh notaris Ny. Harmumtiwati, SH pada tanggal 20 Desember 2013. Jumlah anggota BKM sebanyak 13 orang terdiri dari 8 laki-laki dan 5 perempuan. Sebagai lembaga dengan kepemimpinan kolektif dengan koordinator Bapak Sujono, S.Pd. BKM Umbul Sejahtera dilengkapi dengan unit-unit pengelola kegiatan yakni unit pengelola lingkungan (UPL) dengan jumlah personil 2 orang, unit pengelola sosial (UPS) dengan jumlah personil 2 orang, dan unit pengelola keuangan (UPK) dengan jumlah personil pelaksana 3 orang dan 1 orang pengawas. Informasi umum yang meliputi cakupan wilayah, cakupan penduduk, tersaji dalam tabel 5.3. berikut ini.

Tabel 5.3:
Cakupan Wilayah dan Cakupan Penduduk
BKM Umbul Sejahtera

Cakupan Wilayah		Cakupan Penduduk		Kategori Miskin	
Jml Dusun	15	Jml KK	2.266	Jml KK Miskin	784
Jml RW	32	Jml Jiwa	7.697	Jml Jiwa Miskin	2.276
Jml RT	76	Jml Dewasa	4.757		

Sumber: Korkot Sleman

Cakupan wilayah kerja BKM Umbul Sejahtera di desa Umbul Martani meliputi 15 Dusun, 32 RW dan 76 RT. Jumlah penduduk sebanyak 7.697 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.276 jiwa masuk dalam kategori penduduk miskin

Analisis Gender

Dalam kajian ini analisis gender dipergunakan untuk mengetahui peran serta wanita dalam pembangunan, yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek/program, khususnya untuk melihat apakah peran serta wanita dan pria sudah selaras, serasi dan seimbang dengan kebutuhan mereka, bagaimana kebijaksanaan pada program pembangunan mempunyai dampak yang berbeda pada pria dan wanita.

Sebagaimana yang disampaikan Partini (2009), Kerangka analisis gender mencakup 4 komponen yakni :

1. Profil aktivitas
Diperoleh dari pertanyaan: siapa melakukan apa? Untuk mengetahui tingkat mobilitas wanita. Dari analisis ini akan diketahui sejauh mana partisipasi aktif wanita dibanding pria dalam setiap kegiatan yang akan diteliti. Ditelaah dengan pembagian kerja, curahan waktu dan beban kerja.
2. Profil akses dan kontrol
Untuk melihat bagaimana akses dan kontrol wanita dan pria dalam: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, manfaat dari hasil pembangunan
3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi: aktivitas, akses dan kontrol yang dilihat dari faktor kondisi ekonomi, sosial, norma dan nilai budaya masyarakat
4. Analisis siklus proyek/program
Untuk menganalisis seberapa aktivitas proyek /program mempengaruhi pria dan wanita.

1. Profil Aktivitas

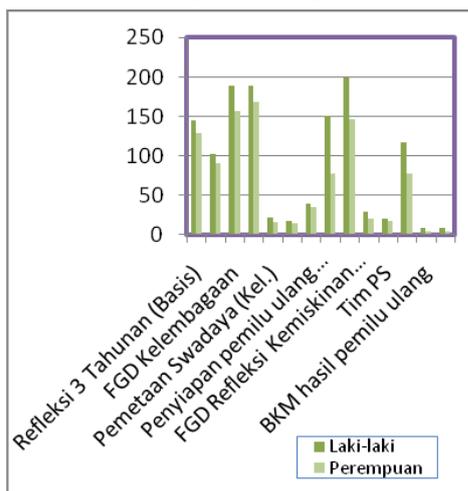
Digunakan untuk mengetahui tingkat partisipasi aktif wanita dibanding pria dalam setiap kegiatan yang akan diteliti. Tabel 5.4, menggambarkan siklus kegiatan BKM Bina Sejahtera, diawali dari refleksi tiga tahunan tingkat basis sampai dengan terbangunnya BKM yang baru. Dalam setiap kegiatan/siklus keterlibatan wanita lebih dari 30%. Dalam pemilu ulang BKM keterlibatan perempuan mencapai 40%, tetapi capaian jumlah anggota perempuan BKM hanya 31%. Dari 13 anggota BKM hanya 4 perempuan. Menurut informasi dari koordinator terpilih pada saat pemilu ulang BKM tidak semua dusun, mengajukan calon perempuan. Meskipun begitu koordinator BKM yang terpilih justru perempuan yakni ibu Suatmini. Profil aktifitas perempuan ditinjau dari tingkat kehadiran menunjukkan; refleksi 3 tahunan tingkat basis sebesar 47%, refleksi 3 tahunan tingkat kelurahan 47%, FGD kelembagaan 45%, pemetaan swadaya tingkat basis 47%, pemetaan swadaya tingkat kelurahan 42%, panitia pembentukan BKM 45%, penyiapan pemilu ulang BKM 47%, seleksi jumlah utusan 34%, FGD refleksi kemiskinan tingkat basis 42%, FGD refleksi kemiskinan tingkat kelurahan 42%, Tim PS 45%, Pemilu ulang BKM 40%, BKM hasil pemilu ulang 31%, jumlah anggota BKM (aktif) 31%. Menurut salah seorang informan, keaktifan perempuan dari nol kegiatan sudah terlihat, maksudnya sejak mereka belum aktif dalam BKM.

Tabel 5.4.
Tingkat Partisipasi dalam Siklus Kegiatan BKM Bina Sejahtera Jogotirto

Tahap Kegiatan	Jenis Kelamin		Persentase (%)	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Refleksi 3 Tahunan (Basis)	145	129	53	47
Refleksi 3 Tahunan (Kel.)	103	90	53	47
FGD Kelembagaan Pemetaan	189	156	55	45
Swadaya (Basis) Pemetaan	189	168	53	47
Swadaya (Kel.) Panitia	22	16	58	42
Pembentukan BKM	17	14	55	45
Penyiapan pemilu ulang BKM	40	35	53	47
Seleksi (Jml utusan)	150	77	66	34
FGD Refleksi Kemiskinan (Basis)	199	146	58	42
FGD Refleksi Kemiskinan (Kel)	29	21	58	42
Tim PS	21	17	55	45
Pemilu ulang BKM	117	78	60	40
BKM hasil pemilu ulang	9	4	69	31
Jumlah Anggota BKM (aktif)	9	4	69	31
Rata-rata				42

Sumber: Korkot Sleman

Grafik 5.1:
Tingkat Partisipasi dalam Siklus Kegiatan BKM Bina Sejahtera Jogotirto



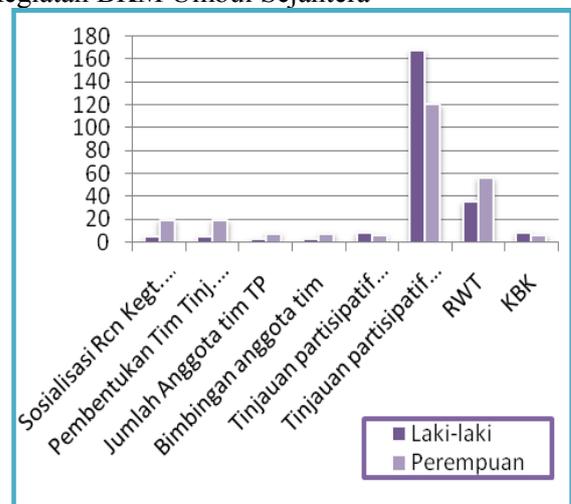
BKM Umbul Sejahtera termasuk dalam tahap siklus dua. Profil Aktivitas diawali dengan sosialisasi rencana kegiatan partisipatif. Dibanding dengan rerata BKM Bina Sejahtera yakni 42%, tingkat keterlibatan perempuan jauh lebih besar dengan rerata 62% (periksa tabel 5.5).

Tabel 5.5.
Tingkat Partisipasi dalam Siklus BKM Umbul Sejahtera

Tahap Kegiatan	Jenis Kelamin		Persentase (%)	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Sosialisasi Rcn Kegt. Tinjauan Partisipatif	5	20	20	80
Pembentukan Tim Tinj. Partisipatif	5	20	20	80
Jumlah Anggota tim TP	3	8	27	73
Bimbingan anggota tim	3	8	27	73
Tinjauan partisipatif internal	9	7	56	44
Tinjauan partisipatif eksternal	168	121	58	42
RWT	36	57	39	61
KBK	9	7	56	44
Rata-rata				62

Sumber: Korkot Sleman

Gambar 5.2 : Tingkat Partisipasi dalam siklus kegiatan BKM Umbul Sejahtera



Tingkat mobilitas perempuan dalam siklus kegiatan yang diadakan BKM Umbul Sejahtera cukup tinggi. Khususnya dalam kegiatan sosialisasi

rencana kegiatan tinjauan partisipatif dan pembentukan tim tinjauan partisipatif. Tingkat kehadiran perempuan sebesar 80%. Tingkat kehadiran yang cukup besar ini berpengaruh pada jumlah anggota tim tinjauan partisipatif yang terbentuk yakni 73% nya adalah perempuan, demikian pula dalam bimbingan anggota tim sebesar 73% adalah perempuan. Dalam tinjauan partisipatif internal 44% dan 42% tinjauan partisipatif eksternal. Dalam rapat warga tahunan lebih dari separo yang hadir adalah perempuan yakni 61%. Namun dalam komunitas belajar kelurahan hanya 44%. Secara keseluruhan dengan melihat tingkat kehadiran dari masing-masing siklus kegiatan tersebut diatas, tingkat partisipasi yang ditinjau dengan tingkat kehadiran cukup tinggi dengan rerata 62%, jauh diatas 30% yang ditargetkan. Meskipun koordinator BKM Umbul sejahtera adalah laki-laki ternyata tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dibanding BKM Bina sejahtera yang dikoordinir perempuan (42%).

Persepsi tingkat keaktifan, menurut salah satu sumber informasi (anggota BKM), apabila tingkat ketidak hadirannya diatas 2, artinya dua kali tidak datang dalam rapat/pertemuan maupun kegiatan, dianggap tidak aktif. Tingkat keaktifan anggota BKM wanita cukup tinggi dilihat dari tingkat kehadirannya. Demikian pula keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan di lapangan, tanpa memandang waktu kegiatan, baik siang maupun malam hari. Seperti yang disampaikan koordinator BKM (wanita), tidak ada kendala ketika pertemuan/kegiatan dilaksanakan malam hari. Namun menurut salah satu pamong desa Umbulmartani, meskipun pada dasarnya ketika kegiatan dilaksanakan malam hari tidak ada masalah, tetapi akan lebih baik kalau dilaksanakan siang hari sehingga pada malam hari ibu-ibu bisa menemani anaknya di rumah.

Semua responden wanita menyatakan tidak ada kendala dalam pembagian kerja. Mereka menyadari bahwa peran wanita dalam keluarga cukup besar, sehingga mereka harus pandai-pandai mengatur waktunya agar ketika meninggalkan rumah untuk melakukan kegiatan BKM, pekerjaan mengurus rumah dan keluarganya tidak terabaikan. Dukungan dan pengertian dari keluarga cukup besar pengaruhnya terhadap aktivitas perempuan di BKM. Meskipun kesibukan sebagai anggota BKM ataupun pengelola unit-unit cukup besar dan membutuhkan curahan waktu, tenaga dan pikiran tetapi mereka merasa senang (enjoy) menghadapinya. Jiwa kerelawanan, rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap kebutuhan warga miskin menjadi pendorong keterlibatan mereka dalam BKM.

Kuota 30% untuk perempuan

Adanya pembatasan kuota 30% menurut beberapa responden justru memberi batasan karena menimbulkan persepsi 30% sudah cukup. Sehingga menimbulkan kecenderungan capaian kuota perempuan, angka 30% menjadi pegangan sekaligus justru membatasi jumlah kuota perempuan perempuan.

Semakin banyak keterlibatan perempuan, kecenderungan lebih hati-hati semakin besar, karena untuk mengurangi resiko sampai hal yang kecil-kecil/teliti dipertimbangkan dan cenderung mengikuti jalur yang ada.

2. Profil akses dan kontrol

Untuk melihat bagaimana akses dan kontrol wanita dan pria dalam: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, manfaat dari hasil pembangunan

BKM merupakan lembaga eksekutif di tingkat desa dengan peran utama sebagai pengendali (steering) bukan pelaksana. Oleh sebab itu lembaga ini dilengkapi dengan unit-unit pelaksana, yakni unit pelaksana lingkungan (UPL), unit pelaksanaan sosial (UPS) dan unit pelaksana keuangan (UPK). Sebagai lembaga kepemimpinan kolektif, BKM dikoordinir oleh seorang koordinator. Mekanisme pemilihan anggota LKM melalui proses pemilihan secara langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun. BKM bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel.

Daur Program Pembangunan Partisipatif

Daur program pembangunan partisipatif yang dilaksanakan BKM diawali dengan penjajagan kebutuhan, identifikasi potensi dan masalah sebagai input dalam membuat perencanaan kegiatan. Keterlibatan anggota BKM dalam menyusun program tidak memandang laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan peran didalamnya. Bahkan salah satu anggota BKM wanita sebelum terpilih menjadi anggota BKM adalah pengelola kegiatan lingkungan yang kegiatan-kegiatannya adalah pembangunan fisik.

Menurut beberapa sumber, dengan keterlibatan wanita sebagai anggota BKM ini menjadikan lebih luwes dalam merancang program. Salah satu kasus terjadi, warga yang belum mempunyai jamban keluarga tidak sungkan untuk mengajukan langsung ke ibu-ibu anggota BKM ini melalui tetangganya. Artinya disini suasana bersifat cair dan kegiatan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan warga, khususnya kebutuhan perempuan.

Sumber lain menyatakan bahwa dengan adanya

kehadiran wanita dalam BKM, program yang direncanakan semakin banyak dan efektif, juga memberi warna dan semangat dalam mengusulkan dan pelaksanaan kegiatan. Pada umumnya perempuan lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga pelaksanaan program jadi bertambah efektif dan efisien.

Ada anggapan bahwa kaum perempuan apabila saat rapat atau di forum lebih banyak yang diam, disini anggapan tersebut tidak terjadi. Kesadaran terhadap peran sebagai wakil warga, cukup tinggi. Hal ini tercermin dari keaktifan para anggota BKM wanita, tidak hanya dari sisi kehadiran tetapi juga aktif dalam penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan maupun dalam monitoring. Di desa Umbulmartani aktivitas perempuan dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Dalam kelembagaan (BKM), 5 dari 13 anggota BKM atau 38% adalah perempuan. Sedangkan di Desa Jogotirto, 4 dari 13 anggota BKM (31%) adalah perempuan dengan koordinator perempuan. Meskipun BKM merupakan lembaga kepemimpinan kolektif, namun dengan adanya koordinator seorang perempuan ini menunjukkan peran serta perempuan dalam kelembagaan cukup besar.

Akses dan kontrol perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, manfaat dari hasil pembangunan cukup besar tergambar dari tabel 5.6. Dalam tabel tersebut, target Key Performance Indicator, Minimum 40% perempuan berpartisipasi dalam pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan terpenuhi. BKM Bina Sejahtera dengan capaian partisipasi perempuan 42%, sedangkan BKM Umbul sejahtera 50%.

Tabel 5.6.
Capaian Key Performance Indicator

Target KPI	Uraian	Bina Sejahtera	Umbul Sejahtera
Minimum 40% perempuan berpartisipasi dalam pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan	Jml Keg. /Even	147	19
	Total Pst Prn	2.134	225
	Total Peserta	5.073	448
	Capaian	42%	50%
Anggota KSM Perempuan	Capaian	61%	53%

Perempuan sebagai penerima manfaat kegiatan pembangunan, tercermin dari capaian

anggota KSM perempuan yang juga cukup tinggi. Lebih dari separo, penerima manfaat program PNPM Mandiri Perkotaan adalah perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan ditinjau dari faktor kebijakan, peraturan dan perundangan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender di dalam pembangunan, strategi PUG (pengarusutamaan) dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dirumuskan strategi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu juga ditetapkan konsep gender sebagai salah satu prinsip utama yang harus diarusutamakan diseluruh program/kegiatan pembangunan. Sasaran-sasaran kebijakan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menekankan pentingnya Strategi Pengarusutamaan Gender yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, memiliki kontrol terhadap sumberdaya, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Adanya kebijakan, peraturan dan perundangan dalam mencapai kesetaraan gender menjadi sangat strategis. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat menetapkan target bagi warga perempuan untuk berpartisipasi sejak dari awal kegiatan, dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa indikator diantaranya adanya target partisipasi perempuan dalam setiap kegiatan yang dilakukan minimal 30%. Dengan adanya target keterlibatan perempuan sebesar 30% perempuan cukup memberi peluang yang cukup besar bagi warga perempuan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan BKM. Baik sebagai pengambil keputusan (sebagai anggota BKM) ataupun sebagai penerima manfaat.

Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan ditinjau dari faktor kultur dan budaya

Dari sisi kultur budaya, budaya patriarkhi memberi anggapan bahwa laki-laki lebih kuat (superior) dibandingkan perempuan. Saat ini khususnya di DIY budaya patriarkhi ini semakin melemah,

sehingga mengurangi tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, dan pada gilirannya semakin memberi peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kelembagaan.

Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan ditinjau dari faktor lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di ranah publik. Dorongan dari anggota keluarga seperti suami dan anak-anak untuk melakukan kegiatan sosial dengan terlibat sebagai anggota BKM. Meskipun demikian menurut penuturan para responden, harus pandai-pandai membagi waktu, jangan sampai kepentingan keluarga terabaikan karenanya. Selain dukungan lingkungan keluarga, dukungan dari lingkungan luar pada umumnya juga sebagai faktor pendukung peran perempuan dalam kelembagaan desa (BKM).

Dari beberapa deskripsi sebelumnya dan informasi dari responden, pada saat ini khususnya di desa Jogotirto dan Umbulmartani dapat dikatakan hampir tidak ada kendala atau hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dari sisi kebijakan, peraturan dan perundangan; kultur, budaya, norma, adat, agama; lingkungan keluarga maupun lingkungan pada umumnya

KESIMPULAN

Dari profil aktivitas rerata partisipasi perempuan BKM Bina Sejahtera 42%, BKM Umbul sejahtera 62%. Lebih besar dari target yang ditetapkan yakni 30%. Kesadaran terhadap peran sebagai wakil warga, cukup tinggi hal ini tercermin dari tingkat kehadiran dan keterlibatan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan maupun dalam monitoring.

Akses dan kontrol perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, manfaat hasil pembangunan cukup besar tergambar dari target Key Performance Indicator, minimum 40% perempuan berpartisipasi, tingkat capaian BKM Bina Sejahtera 42% dan BKM Umbul Sejahtera 50%.

Selain itu semua responden menyatakan tidak ada kendala bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa (BKM).

REFERENSI

- Davis, Keith, 1990, *Perilaku dalam Organisasi*; Jakarta: Erlangga.
- Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.
- Listyaningsih, 2010, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan di Banten*, Jurnal Administrasi Publik, (I,2), Desember, hal. 143-166
- Modul pelatihan dasar P2KP-PNPM, 2008, Bahan Bacaan: Analisa Gender dan Ketidakadilan _____, Bahan Bacaan: Perempuan, Partisipasi dan Pemberdayaan
- Moeloeng, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- North DC.1990, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*; Cambridge: Cambridge University Press
- Partini Suardiman Siti, 1999, Bahan Pelatihan: *Penelitian Berperspektif Gender*, PSW-UMY, Yogyakarta
- Partini Suardiman Siti, 2012, Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol 1, No. 2, Nopember
- Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*, Makalah Kebijakan; 2010, UNDP Indonesia
- Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan*, 2009; Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa
- Ruttan VW and Hayami, 1984, *Toward a Theory of Induced Institutional Innovation*. Journal of Development Studies, Vol. 20: 203-220
- Sofiani Triana, 2009, *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*, Jurnal Muwazah, (I,1), Januari – Juni, hal 63-71
- Sofyan Syukrie Erna, 2003, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan*.
- Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*; Yogyakarta: PT. Rineka Cipta

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta Bandung
Sutopo, Habertus. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.

Syahyuti, 2006: *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*; Jakarta: Bina Rena Pariwara
Yin, R. K., 2003, *Case Study Research: Design and Methods*. Sage Publications:USA